

---

### **3. Ringkasan Urusan Pilihan**

#### **a. Kelautan dan Perikanan**

##### **1) Program dan Kegiatan**

###### **a) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir**

Program tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dengan hasil antara lain meningkatnya kualitas pengelolaan garam melalui pembangunan gudang garam di Kabupaten Brebes, pembangunan 39 unit tunnel garam di 5 kabupaten, dan pembangunan 9 unit rumah prisma garam di 4 kabupaten; meningkatnya kemampuan dan keterampilan 120 wanita pesisir dan 25 taruna pesisir melalui sosialisasi pemberdayaan usaha; dan meningkatnya kualitas informasi produksi garam melalui pengembangan sistem informasi.

###### **b) Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**

Program tersebut dilaksanakan melalui 2 kegiatan, yaitu: Kegiatan Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan dengan hasil meningkatnya pemahaman aparatur pemerintah dan masyarakat mengenai peraturan ruang laut melalui pelaksanaan sosialisasi di 17 kabupaten/kota pesisir Jawa Tengah, meningkatnya kualitas dokumen RZWP3K Jawa Tengah dan penetapan Pergub Tindak Lanjut Perda RZWP3K; Kegiatan Peningkatan Pengembangan Balai Pengawasan dan Konservasi Wilayah Pantura Barat dan Pantai Selatan dengan hasil antara lain meningkatnya ketertiban usaha perikanan melalui pelaksanaan operasi pengawasan usaha perikanan, meningkatnya kemampuan dan keterampilan Pokmaswas melalui pembinaan, dan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap rehabilitasi ekosistem mangrove dan terumbu karang melalui sosialisasi; serta Kegiatan Peningkatan Pengembangan Balai Pengawasan dan Konservasi Wilayah Pantura

---

Timur dengan hasil antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai rehabilitasi ekosistem mangrove dan terumbu karang, meningkatnya jumlah tanaman mangrove di wilayah Pantura Timur melalui penanaman bibit mangrove, dan meningkatnya kualitas ekosistem laut di wilayah Pantura Timur melalui penenggelaman terumbu karang buatan.

**c) Program Pengembangan Perikanan Tangkap**

Program tersebut dilaksanakan melalui 14 kegiatan, antara lain: adalah Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sarana Prasarana PPP Tasikagung dengan hasil antara lain meningkatnya kemampuan dan keterampilan nelayan dan bakul melalui pembinaan sebanyak 80 orang, meningkatnya pemahaman nelayan tentang perijinan kapal perikanan dan keselamatan berlayar melalui sosialisasi masing-masing sebanyak 40 orang; Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana PPP Karimunjawa dengan hasil meningkatnya kualitas SDM nelayan PPP Karimunjawa melalui 5 kali pembinaan dan meningkatnya kualitas sarana dan prasarana PPP Karimunjawa melalui 2 paket peningkatan sarpras; dan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Kenelayanan dengan hasil meningkatnya populasi ikan melalui pengadaan rumah ikan, komunikasi nelayan semakin baik melalui pengadaan perangkat radio komunikasi, dan meningkatnya kondusivitas penangkapan ikan melalui koordinasi serta sinkronisasi kegiatan andon penangkapan ikan dan lembaga pengelola perikanan di WPP 573 dan 712 dengan 5 provinsi.

**d) Program Pengembangan Perikanan Budidaya**

Program tersebut dilaksanakan melalui 5 kegiatan, yaitu: Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana perbenihan dan budidaya ikan air tawar dengan hasil meningkatnya ketersediaan pakan dan obat-obatan di Satker Lingkup BBIAT Muntilan, meningkatnya pelayanan PBIAT melalui pengembangan 4 Loka PBIAT

---

(Ambarawa, Tambaksogra, Singasari, dan Randudongkal), meningkatnya jejaring kemitraan dan transaksi agrobisnis melalui Gelar Promosi Agrobisnis Soropadan; Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana perbenihan dan budidaya ikan air payau dan laut dengan hasil antara lain meningkatnya populasi dan kualitas ikan nila *saline*, bandeng, udang *vannamei* melalui pengembangan budidaya di BBIAPL Semarang dan Loka BIAP Maribaya, dan pembudidayaan biota perairan semakin optimal melalui Desiminasi IMTA di Loka PBIAL Karimunjawa; Kegiatan pengelolaan lingkungan dan statistik perikanan budidaya dengan hasil antara lain meningkatnya pemahaman masyarakat untuk menjaga kearifan lokal perikanan melalui sosialisasi CBF (*Culture Based Fisheries*), meningkatnya kualitas pelayanan di LP Keskanling-BBIAT-BBIAPL melalui pengadaan dan pemenuhan sarana prasarana, meningkatnya kapasitas pembudidaya ikan dalam pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan di Jawa Tengah; Kegiatan Revitalisasi Perikanan Budidaya Air Tawar dengan hasil meningkatnya jejaring dan koordinasi pembudidaya ikan air tawar melalui rebug gayeng Ikan Lele-Nila-Patin di Jawa Tengah, meningkatnya kemampuan pembiayaan pembudidaya ikan di Jawa Tengah melalui fasilitasi pembiayaan, meningkatnya kemampuan PBIAT melalui Revitalisasi Loka PBIAT Singasari dan loka PBIAT Janti; Kegiatan revitalisasi perikanan budidaya air payau dengan hasil meningkatnya kualitas dan ketersediaan data desa miskin potensi perikanan guna mendukung pengentasan kemiskinan dan pengangguran, meningkatnya produksi hasil budidaya dan PAD loka-loka BBIAPL Karanganyar Tugu, dan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya air payau dan laut.

---

**e) Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan**

Program tersebut dilaksanakan melalui 7 kegiatan, antara lain: Kegiatan Pengembangan Perencanaan Dan Monitoring Evaluasi Program Kegiatan Kelautan Dan Perikanan dengan hasil antara lain meningkatnya sinergitas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui rakor sinkronisasi program dan kegiatan Tahun 2019, meningkatnya kualitas data dan informasi melalui *updating website* dan pengembangan PPID dan semakin optimalnya pengelolaan kegiatan melalui penyusunan dokumen rencana tindak pengendalian; Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan dan Kelautan dengan hasil antara lain meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang program GEMARIKAN melalui kampanye GEMARIKAN di 40 lokasi, meningkatnya jejaring dan kemitraan produk perikanan melalui Gelar Produk pada *event* SAE, Jateng Fair, Hari Pangan Sedunia Tingkat Provinsi dan Produk Inovasi, serta meningkatnya kemampuan pembudidaya ikan melalui fasilitasi pengembangan usaha dan workshop pengembangan logistik ikan; Kegiatan peningkatan pelayanan mutu usaha perikanan dengan hasil antara lain meningkatnya kualitas hasil perikanan melalui pembinaan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan bagi unit pengolahan ikan skala kecil, meningkatnya pengetahuan tentang diversifikasi olahan hasil perikanan melalui bimtek bagi unit pengolahan ikan skala kecil, dan meningkatnya kemampuan pembiayaan melalui fasilitasi akses Kredit Mitra 25; Kegiatan peningkatan perluasan usaha dan koordinasi kelembagaan pelaku usaha perikanan dengan hasil antara lain meningkatnya kapasitas SDM Penyuluh Perikanan melalui Pelatihan Peningkatan di 6 kabupaten wilayah kemiskinan dan pengangguran, meningkatnya kemampuan pelaku usaha dan

---

masyarakat kelautan perikanan melalui fasilitasi penguatan kelompok di 6 kabupaten wilayah kemiskinan dan pengangguran, dan meningkatnya kualitas pengelolaan perikanan melalui fasilitasi pendampingan penyuluh di desa berdikari; dan Kegiatan peningkatan dan pengembangan LPPMHP Semarang dan LPPMHP Pekalongan dengan hasil antara lain meningkatnya kapasitas SDM perikanan melalui *in house training* pengembangan metode pengujian, meningkatnya mutu hasil perikanan melalui pengadaan sarpras penunjang, dan meningkatnya kesiapan UMKM dalam rangka penerapan LSPro ISO 17065 melalui pelaksanaan bimbingan.

**f) Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**

Program tersebut dilaksanakan melalui 2 kegiatan, yaitu: Kegiatan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan dengan hasil antara lain meningkatnya kualitas ekosistem laut di Kabupaten Batang melalui penenggelaman terumbu karang buatan di perairan, meningkatnya jumlah populasi mangrove melalui penanaman bibit mangrove di Kabupaten Jepara dan Pati, dan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi ekosistem mangrove dan sumberdaya kelautan perikanan melalui pelaksanaan sosialisasi serta Kegiatan Rehabilitasi Habitat Vital dengan hasil meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai peraturan pengelolaan ruang laut melalui sosialisasi Tingkat Provinsi dan 17 kabupaten/kota pesisir di Jawa Tengah.

**2) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara**

Dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dan Biro Infrastruktur Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah.

---

### 3) Proses Perencanaan Pembangunan

Proses penyusunan perencanaan program tahun 2018 dilakukan dengan pendekatan partisipatif, bottom up dan top down, teknokratik dan politik yang implementasinya melalui 7 (tujuh) tahapan sebagai berikut :

- a) konsultasi publik melalui *Focused Group Discussion* (FGD) dan *expert meeting* yang melibatkan representasi *stakeholder* pembangunan daerah diantaranya tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta anggota DPRD;
- b) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum SKPD;
- c) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum gabungan SKPD;
- d) forum Musrenbang RKPD 2018;
- e) konsultasi Rancangan Akhir RKPD 2018 ke Kementerian Dalam Negeri;
- f) dialog interaktif dengan DPRD Jawa Tengah, guna memperoleh masukan-masukan untuk penyempurnaan;
- g) penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang selanjutnya dijabarkan dalam Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman SKPD dalam menyusun RKA.

### 4) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Di dalam melaksanakan urusan perikanan dan kelautan, kondisi sarana dan prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan dan Biro Infrastruktur Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah relatif memadai. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan aset daerah yaitu berupa tanah dan peralatan (alat kantor dan rumah tangga, alat laboratorium), gedung dan bangunan, buku perpustakaan.

### 5) Alokasi dan Realisasi Anggaran.

Dialokasikan anggaran Rp64.097.224.000,00 melalui 6 Program dengan realisasi fisik sebesar 89,07% dan keuangan 84,69% sebagai berikut:

- 1) **Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir**, dialokasikan anggaran Rp3.460.400.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,47%.

- 2) **Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**, dialokasikan anggaran Rp2.100.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,30%.
- 3) **Program Pengembangan Perikanan Tangkap**, dialokasikan anggaran Rp30.097.521.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 77,05% dan realisasi keuangan sebesar 71,55%.
- 4) **Program Pengembangan Perikanan Budidaya**, dialokasikan anggaran Rp18.639.303.000,00 realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,55%.
- 5) **Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan**, dialokasikan anggaran Rp8.200.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 98,83% dan realisasi keuangan sebesar 94,70%.
- 6) **Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**, dialokasikan Rp1.600.000.000,00 realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 94,84%.

## 6) Permasalahan dan Solusi.

### a) Permasalahan

- (1) Terjadinya perubahan proses perizinan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (ukuran kapal >30 GT) yang mengharuskan penyesuaian dokumen (*gross akte, pass besar, surat izin penangkapan ikan dan surat izin usaha perikanan*);
- (2) Penanganan nelayan cantrang di Provinsi Jawa Tengah;
- (3) Terbatasnya ketersediaan bahan baku dan formulasi untuk pembuatan pakan mandiri sehingga pelaksanaan program pakan mandiri belum optimal;
- (4) Tingginya kerusakan ekosistem mangrove sebagai akibat dari alih fungsi pemanfaatan kawasan pesisir (permukiman, tambak, penangkapan, pertambangan, pembangkit energi);
- (5) Belum optimalnya kualitas dan produktifitas garam di Jawa Tengah.

---

**b) Solusi**

- (1) Sosialisasi dan pelayanan perizinan bersama instansi terkait dengan sistem jemput bola dan pelayanan gerai perizinan di lokasi sentra-sentra nelayan. Untuk kapal < 30 GT pelayanan gerai bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah dan untuk kapal > 30 GT bersama Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- (2) *Replacement* (penggantian) alat tangkap cantrang dengan alat tangkap yang ramah lingkungan;
- (3) Pemenuhan kebutuhan bahan baku pakan dengan memanfaatkan/mengoptimalkan bahan baku lokal serta penyempurnaan mesin pembuat pakan;
- (4) Penanaman/rehabilitasi mangrove dan sosialisasi tentang pentingnya ekosistem mangrove;
- (5) Penerapan teknologi untuk peningkatan kualitas dan produktivitas garam (rumah tunnel, prisma garam, geoisolator, dan gudang garam).

**b. Pariwisata****1) Program dan Kegiatan****a) Program Pemasaran Pariwisata**

Program tersebut dilaksanakan melalui 5 kegiatan, yaitu: Kegiatan Peningkatan Kualitas Promosi dan Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata dengan hasil meningkatnya kualitas promosi dan informasi pariwisata melalui pembuatan 4.000 eksemplar *Calendar of Events*, 10 Paket promosi melalui Media Cetak dan Elektronik, pemuatan Info Pariwisata Jawa Tengah di Media Massa sebanyak 52 kali; Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata di Luar Negeri dengan hasil terselenggaranya 3 kali partisipasi pada Pameran Promosi di Asia dan Eropa; Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pelayanan

---

Informasi Pariwisata Jawa Tengah dengan hasil meningkatnya kualitas pelayanan informasi pariwisata di *Tourism Information Centre* (TIC) Provinsi Jawa Tengah melalui *updating website* dan *touchscreen*, rapat teknis promosi, dan peningkatan kemampuan SDM pengelola TIC; Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata di Dalam Negeri, dengan hasil meningkatnya informasi dan promosi pariwisata antara lain melalui pembinaan promosi pariwisata, penyelenggaraan partisipasi pada Gebyar Wisata Budaya Nusantara (GWBN), dan penyelenggaraan partisipasi pada Jateng *Fair*, dan Kegiatan Pengembangan Pasar Pariwisata, dengan hasil meningkatnya pengembangan Pasar Wisata antara lain melalui 4 kegiatan *roadshow* Pasar Potensial Jawa Tengah, penyusunan 100 Buku dan 100 Buku Saku Data Kepariwisata serta penyusunan 100 buku *Roadmap* Pengembangan Pasar Pariwisata Jawa Tengah.

**b) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**

Program tersebut dilaksanakan melalui 5 kegiatan, antara lain : Kegiatan Peningkatan Manajemen Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata dengan hasil meningkatnya kualitas manajemen dan pelayanan pada usaha jasa dan sarana pariwisata yang antara lain mencakup pembinaan 8 Usaha Pariwisata di Jawa Tengah sebanyak 8 kali/400 orang, *monitoring* pengawasan pelaksanaan Usaha Pariwisata di Jawa Tengah sebanyak 175 Usaha, dan Digitalisasi Industri Pariwisata di Jawa Tengah sebanyak 13 Usaha/35 orang); Kegiatan Pengembangan potensi Keunikan Lokal Masyarakat dan Alam Menjadi Atraksi Wisata, dengan hasil meningkatnya keunikan lokal masyarakat dan alam menjadi atraksi wisata antara lain melalui pengelolaan 50 Desa Wisata di Jawa Tengah, Festival Desa Wisata se-Jawa Tengah, dan penyusunan Profil Desa Wisata dan Daya Tarik Wisata; Kegiatan Pemantapan Kinerja SDM Pariwisata, dengan hasil meningkatnya kinerja SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif antara lain melalui pembekalan Pramuwisata

---

sebanyak 40 orang dan fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Pramuwisata/Tenaga Kerja Perhotelan sebanyak 80 orang, peningkatan dan pengembangan SDM Ekonomi Kreatif sebanyak 400 orang, dan fasilitasi Sertifikasi Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif sebanyak 100 orang; Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Sarana Pariwisata Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan hasil meningkatnya kualitas dan pelayanan Hotel Milik Pemerintah Daerah Jawa Tengah melalui pembinaan dan pengawasan hotel, peningkatan kualitas SDM pengelola hotel, dan peningkatan promosi hotel melalui *family trip*; dan Kegiatan Perkuatan Kualitas Kompetensi Remaja, Mas dan Mbak Duta Wisata Bidang Pariwisata, dengan hasil meningkatnya kualitas promosi pariwisata melalui Pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Jawa Tengah 2018 sebanyak 70 orang, dan pemberdayaan Duta Wisata sebanyak 15 orang.

**c) Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata**

Program tersebut dilaksanakan melalui 4 kegiatan, yaitu Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan dengan hasil meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan antara lain melalui pembinaan 100 orang anggota Pokdarwis dan pembuatan panduan sadar wisata dan sapta pesona sebanyak 1.200 eksemplar, pembentukan Pokdarwis sejumlah 1.000 orang, dan aktualisasi sadar Wisata Sapta Pesona sebanyak 30 orang; Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dengan Pemangku Kepentingan Bidang Pariwisata, dengan hasil meningkatnya kerjasama pariwisata dan ekonomi kreatif antara Pemerintah/Provinsi (*G to G*), bertambahnya jumlah klaster dan komunitas pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pengembangan 4 klaster, dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sektor pariwisata melalui penyelenggaraan dialog pariwisata dan ekonomi kreatif; Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Pariwisata Jawa Tengah,

---

dengan hasil semakin optimalnya pengelolaan sektor pariwisata berdasarkan rekomendasi usulan program dan kegiatan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif tahun 2019; dan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pariwisata, dengan hasil meningkatnya kualitas pelaksanaan Program dan Kegiatan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

## **2) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara**

Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dan Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah.

## **3) Proses Perencanaan Pembangunan**

Proses penyusunan perencanaan program tahun 2018 dilakukan dengan pendekatan partisipatif, bottom up dan top down, teknokratik dan politik yang implementasinya melalui 7 (tujuh) tahapan sebagai berikut :

- a) konsultasi publik melalui *Focused Group Discussion* (FGD) dan *expert meeting* yang melibatkan representasi *stakeholder* pembangunan daerah diantaranya tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta anggota DPRD;
- b) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum SKPD;
- c) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum gabungan SKPD;
- d) forum Musrenbang RKPD 2018;
- e) konsultasi Rancangan Akhir RKPD 2018 ke Kementerian Dalam Negeri;
- f) dialog interaktif dengan DPRD Jawa Tengah, guna memperoleh masukan-masukan untuk penyempurnaan;
- g) penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang selanjutnya dijabarkan dalam Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman SKPD dalam menyusun RKA.

---

#### **4) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan**

Di dalam melaksanakan Urusan Pariwisata, kondisi sarana dan prasarana Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dan Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah relatif memadai. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan aset daerah yaitu berupa tanah dan peralatan (alat kantor dan rumah tangga, alat studio), gedung dan bangunan, buku perpustakaan serta barang bercorak kesenian dan kebudayaan.

#### **5) Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Dengan anggaran sejumlah Rp34.580.822.000,00 melalui 3 program dengan realisasi fisik sebesar 97,01% dan realisasi keuangan 87,65% sebagai berikut:

- a) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**, dengan alokasi anggaran sejumlah Rp11.241.935.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 86,31%.
- b) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**, dengan alokasi anggaran sejumlah Rp20.763.887.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 95,02% dan realisasi keuangan 87,72%.
- c) Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata**, dengan alokasi anggaran sejumlah Rp2.575.000.000,00 realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 92,86%.

#### **6) Permasalahan dan Solusi**

##### **a) Permasalahan**

- (1) Belum optimalnya sebaran wisatawan ke Jawa Tengah.
- (2) Belum optimalnya sarana prasarana pemasaran pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
- (3) Belum sinerginya pembangunan destinasi pariwisata.
- (4) Kurang optimalnya kualitas daya tarik wisata di destinasi pariwisata.
- (5) Belum optimalnya kualitas usaha pariwisata yang berdaya saing di bidang pariwisata.

- 
- (6) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang pariwisata yang berkompeten.
  - (7) Belum optimalnya pemahaman kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan Sapta Pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan di destinasi pariwisata.
  - (8) Kurangnya pengembangan inovasi dan kreatifitas masyarakat lokal terhadap produk UMKM sektor pariwisata.
  - (9) Kurang optimalnya kinerja lembaga/forum pariwisata dan ekosistem Ekonomi Kreatif.
  - (10) Belum sinerginya kerjasama/kemitraan antar pelaku (pemerintah, swasta dan kelompok masyarakat) dalam pembangunan kepariwisataan.

**b) Solusi**

- (1) Meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi pariwisata yang diprioritaskan;
- (2) Meningkatkan kualitas sarana pemasaran dan promosi pariwisata;
- (3) Meningkatkan sinergitas pembangunan destinasi pariwisata dengan pelaku pariwisata (pemerintah, swasta dan masyarakat);
- (4) Mengembangkan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas dan berdaya saing;
- (5) Mengembangkan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas;
- (6) Meningkatkan kualitas dan fasilitasi sertifikasi kompetensi kepada SDM pariwisata;
- (7) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Sapta Pesona dan Sadar Wisata;
- (8) Meningkatkan kompetensi inovasi dan kreatifitas masyarakat lokal terhadap produk UMKM sektor pariwisata melalui pelatihan.

- 
- (9) Memperkuat lembaga/forum pariwisata dan ekosistem Ekonomi Kreatif melalui pendampingan pelatihan;
  - (10) Mengembangkan skema kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat dengan mengutamakan masyarakat lokal.

## **c. Pertanian**

### **1) Program dan Kegiatan**

#### **a) Program Pengembangan Agribisnis**

Program tersebut dilaksanakan melalui 10 kegiatan, antara lain: Kegiatan Pengembangan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan, dengan hasil antara lain meningkatnya keterampilan petani dalam budidaya tanaman perkebunan melalui bantuan benih kelapa 10.000 batang, cengkeh 9.000 batang, dan kopi robusta 40.000 batang; Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dengan hasil antara lain meningkatnya produksi tanaman pangan melalui bantuan benih dan sarpras untuk padi gogo 4.000 ha, intensifikasi kedelai 10.000 ha, percontohan padi salinitas 100 ha; Kegiatan Peningkatan Produksi Hortikultura dengan hasil antara lain pengembangan kentang G2 5 ha, kentang G1 1 ha, bawang merah 6 ha, dan tanaman hias sedap malam 7 ha; Kegiatan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan hasil meningkatnya kesehatan ternak 282.792 ekor, menurunnya kasus Avian influenza 27%, dan menurunnya pemotongan betina produktif sebesar 20%; Kegiatan Peningkatan Kinerja Balai Inseminasi Buatan Ungaran, dengan hasil tersedianya produksi semen beku sapi 376.530 dosis, semen beku kambing 28.877 dosis, pejantan unggul sapi sebanyak 50 ekor, dan pejantan unggul kambing sebanyak 20 ekor.

---

**b) Program Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian**

Program tersebut dilaksanakan melalui 10 kegiatan, antara lain: Kegiatan Pemberian Penghargaan untuk Kelembagaan Penyuluhan/Pelaku Utama/Usaha, Penyuluh serta Pelaku Utama/Usaha, dengan hasil meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan penyuluhan, pelaku utama, pelaku usaha dan penyuluh 11 kategori; Kegiatan Pembinaan SDM Penyuluh, dengan hasil terpantaunya kinerja SDM penyuluh melalui apel siaga dan Latihan Kunjungan, Supervisi dan Evaluasi (LAKUSUSI) penyuluh ke wilayah binaan 14 penyuluh; Kegiatan Peningkatan Kapasitas Balai Penyuluhan dan Pos Penyuluhan Pedesaan, dengan hasil meningkatnya kapasitas balai penyuluh dan Posluhdes di 20 kabupaten; Kegiatan Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau Melalui Penyuluhan dengan hasil meningkatnya kemampuan dan ketrampilan petani tembakau melalui pelatihan kapasitas SDM penyuluh dan PUPU pertanian/peternakan terintegrasi pertanian sebanyak 360 orang, magang petani sebanyak 200 orang, dan pertemuan SL dan demplot 200 orang.

**2) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara**

Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam.

**3) Proses Perencanaan Pembangunan**

Proses penyusunan perencanaan program tahun 2018 dilakukan dengan pendekatan partisipatif, *bottom up* dan *top down* dan teknokratik melalui berbagai tahapan sebagai berikut : (1) konsultasi publik melalui *Focused Group Discussion* (FGD) yang melibatkan *stakeholder* diantaranya tokoh masyarakat, pakar dari Perguruan Tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), asosiasi profesi dan dunia usaha serta anggota DPRD; (2) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum

---

SKPD; (3) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum gabungan SKPD; (4) forum Musrenbang RKPD 2017.

#### **4) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)**

Kondisi sarana dan prasarana Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam relatif memadai. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan aset daerah yaitu berupa tanah, peralatan dan mesin (alat berat, alat angkut, alat kantor dan rumah tangga, alat laboratorium), gedung dan bangunan, buku perpustakaan.

#### **5) Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Total anggaran sejumlah Rp221.086.443.000,00 realisasi fisik sebesar 95,08% dan realisasi keuangan 85,67% dengan rincian sebagai berikut:

**a) Program Pengembangan Agribisnis,** dengan alokasi anggaran sejumlah Rp205.265.293.000,00 realisasi fisik 94,70% dan realisasi keuangan 85,06%.

**b) Program Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian,** alokasi anggaran sejumlah Rp15.821.150.000,00 realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 93,51%.

#### **6) Permasalahan dan Solusi**

##### **a) Permasalahan**

- (1) Belum optimalnya produksi dan produktivitas beberapa komoditas tanaman pangan, perkebunan dan peternakan;
- (2) Masih rendahnya daya saing produk-produk pertanian dan perkebunan;
- (3) Lemahnya kemampuan akses petani terhadap teknologi dan informasi pasar;
- (4) Masih rendahnya skala usaha pertanian pangan dan peternakan di masyarakat sehingga kurang menguntungkan.

**b) Solusi**

- (1) Intensifikasi tanaman pangan, perkebunan dan peternakan;
- (2) Penerapan teknologi budidaya dengan Good Agriculture Practices;
- (3) Pengenalan teknologi pemasaran dengan menggunakan sistem online;
- (4) Pengembangan korporasi pertanian, peternakan dan kawasan terintegrasi industri pertanian dan peternakan.

**d. Kehutanan****1) Program dan Kegiatan.****a) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan**

Program tersebut dilaksanakan melalui 22 kegiatan, antara lain: Kegiatan Bantuan Bibit, Perbenihan dan Pengembangan Budidaya Tanaman Kehutanan BPH III, dengan hasil antara lain bertambahnya jumlah bibit tanaman sebanyak 200.000 batang, meningkatnya kondisi ekosistem mangrove di 2 lokasi, dan meningkatnya kualitas Sumber Mata Air Daerah Penyangga KK/HL di 10 lokasi; Kegiatan Bantuan Bibit, Perbenihan dan Pengembangan Budidaya Tanaman Kehutanan BPH Wilayah V, dengan hasil antara lain bertambahnya jumlah bibit penghijauan sebanyak 200.000 batang, meningkatnya kondisi ekosistem mangrove sebanyak 3 unit di 3 lokasi, meningkatnya kemampuan pengendalian hama penyakit tanaman kehutanan melalui bimbingan teknis sebanyak 3 kali; Kegiatan Pengembangan Usaha Hutan Rakyat dan Aneka Usaha Kehutanan BPH Wilayah V, dengan hasil antara lain bertambahnya bibit hutan rakyat sebanyak 100.000 batang, bertambahnya Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Unggulan Bambu sebanyak 5000 batang, dan bertambahnya luasan penanaman pada sumber mata air seluas 75 Ha; Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan, dengan hasil meningkatnya pengelolaan

---

persemaian permanen, bertambahnya produksi Bibit tanaman hutan dan MPTS sebanyak 1.500.000 batang, dan meningkatnya informasi pengumpulan benih/materi ASDG/eksplorasi tanaman kehutanan; dan Kegiatan Pengelolaan Kebun Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan dan MPTS (Persemaian Permanen), dengan hasil antara lain meningkatnya kemampuan dan legalitas pengada pengedar benih bibit, meningkatnya pengelolaan sumber benih tanaman kehutanan, dan terbinanya kemampuan dan ketrampilan pengelola persemaian permanen.

**b) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan**

Program tersebut dilaksanakan melalui 5 kegiatan, antara lain: Kegiatan Pengembangan Jasa Lingkungan, dengan hasil meningkatnya kemampuan dan keterampilan pengembangan wisata alam di 22 lokasi dan meningkatnya koordinasi pemanfaatan jasa lingkungan melalui rapat koordinasi sebanyak 1 kali; Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Hasil Hutan, Pemasaran Hasil Hutan dan Restrukturisasi Industri Kehutanan, dengan hasil antara lain meningkatnya pemahaman tentang regulasi perijinan, pemenuhan, dan pemanfaatan bahan baku industri, meningkatnya jumlah Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) sebanyak 30 unit, tersebarnya informasi produk hasil hutan melalui pameran produk hasil hutan sebanyak 2 kali; Kegiatan Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Hasil Hutan di BPPHH Wilayah I, dengan hasil antara lain bertambahnya data laporan pemanfaatan hasil hutan dan industri hasil hutan di 17 kabupaten/kota, meningkatnya kemampuan pengelola UMHR dan Unit Pengolahan Hasil Hutan melalui pembekalan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sebanyak 6 kali, dan meningkatnya kemampuan penyusunan rencana pemenuhan bahan baku industri tahunan kapasitas produksi sampai dengan 6.000 m<sup>3</sup>/tahun melalui bimtek sebanyak 8 kali; Kegiatan Pembinaan Pengendalian dan

---

Pengawasan Pemanfaatan Hasil Hutan di BPPHH Wilayah II, dengan hasil meningkatnya pengendalian pemanfaatan hasil hutan di 9 KPH.

**c) Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan**

Program tersebut dilaksanakan melalui 4 kegiatan, antara lain: Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Kehutanan, dengan hasil meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan dengan mengacu perencanaan kegiatan dan anggaran sebanyak 5 dokumen; Kegiatan Koordinasi dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan, dengan hasil terevaluasinya pelaksanaan RKTP, meningkatnya keserasian antara rencana-rencana kehutanan dengan RTRW di 5 Kabupaten/Kota, meningkatnya pelaksanaan kegiatan sesuai Rencana Teknik Perum Perhutani di 20 KPH; Kegiatan Inventarisasi Hutan dan Pengembangan Informasi Sumber Daya Hutan, dengan hasil bertambahnya data/informasi potensi Hutan Rakyat pada 24 UMHR dan 20 KPH di 35 Kabupaten/Kota dan meningkatnya kualitas data dan informasi melalui Sistem Informasi Sumber Daya Hutan dan Statistik Kehutanan; Kegiatan Penatagunaan Hutan, dengan hasil meningkatnya kualitas pengelolaan hutan melalui penyusunan Pertimbangan Teknis Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan sebanyak 8 dokumen serta meningkatnya ketersediaan data dan informasi monitoring pemungutan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.

**d) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan**

Program tersebut dilaksanakan melalui 14 kegiatan, antara lain: Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan (BPH Wilayah IV) dengan hasil meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengamanan hutan; Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan (BPH Wilayah III), dengan hasil antara lain meningkatnya kepedulian dan koordinasi yang sinergis pada MMP dan MPA melalui pembinaan 150 orang, meningkatnya kualitas SDM dan

---

pemahaman masyarakat dalam pengendalian OPT Kehutanan sebanyak 120 orang, dan meningkatnya pengelolaan KEE melalui pembinaan 150 orang; Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan (BPH Wilayah VIII), dengan hasil antara lain meningkatnya ketrampilan 60 orang anggota KTH dalam menangani OPT Kehutanan, meningkatnya kualitas pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) melalui pembinaan dan pemantauan terhadap 90 orang, dan berkembangnya hutan wisata berbasis konservasi melalui bintek Kader Konservasi dan Ekowisata sebanyak 45 orang; Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan (BPH Wilayah V), dengan hasil antara lain meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui pembinaan MMP/MPA sebanyak 3 kali, meningkatnya jumlah dan kualitas sarpras pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebanyak 65 paket, serta meningkatnya pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan (BPH Wilayah I), dengan hasil meningkatnya kualitas SDM pengelolaan hutan melalui pembinaan masyarakat MPA sebanyak 200 orang, meningkatnya kemampuan SDM dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan melalui sosialisasi dan bimtek kepada 100 orang, serta meningkatnya jumlah dan kualitas prasarana prasarana kebakaran hutan sebanyak 1 paket.

**e) Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan**

Program tersebut dilaksanakan melalui 17 kegiatan, antara lain: Kegiatan Pembangunan Daerah Penyangga Kawasan Konservasi dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Lindung (BPPHH PKK II), dengan hasil antara lain meningkatnya jumlah sarana penyuluhan tanaman bawah tegakan melalui pembuatan demplot, meningkatnya jumlah Kader Konservasi Alam/Kelompok Pecinta Alam/Pramuka SWB/Kalpatar melalui pembentukan kader sebanyak 5 kali, dan meningkatnya jumlah peralatan pengolahan pasca panen melalui

---

fasilitasi kepada masyarakat di daerah penyangga; Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) BPH III, dengan hasil antara lain meningkatnya kemampuan dan keterampilan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) melalui bintek usaha produktif mendukung IFS di 4 lokasi, meningkatnya peran serta masyarakat melalui Fasilitas Kelembagaan LMDH/KTH di 5 lokasi, dan meningkatnya sarpras usaha ekonomi produktif melalui fasilitas sebanyak 11 unit; Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) (BPH Wilayah VII), dengan hasil meningkatkan kemampuan masyarakat sekitar hutan dalam pengolahan pasca panen melalui pelatihan di 5 Kabupaten, meningkatnya kapasitas SDM kehutanan dan kelembagaan di 17 Kabupaten, dan meningkatnya kualitas kelembagaan LMDH di 3 Kabupaten/Kota; Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan dan Perekonomian Masyarakat Sekitar Hutan, dengan hasil antara lain meningkatnya kemampuan kelembagaan masyarakat sekitar hutan sebanyak 60 orang, meningkatnya kemitraan masyarakat sekitar hutan sebanyak 60 orang, dan meningkatnya koordinasi dan evaluasi penyuluhan tingkat Provinsi melalui pertemuan koordinasi dan evaluasi sebanyak 3 kali; Kegiatan Kampanye Indonesia Menanam (KIM), dengan hasil antara lain meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang KIM melalui pertemuan sosialisasi sebanyak 3 kali, meningkatnya ketersediaan informasi penyuluhan melalui liputan dan publikasi materi sebanyak 1 kali, meningkatnya diseminasi informasi dan teknologi.

## **2) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara**

Urusan Kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam.

---

### 3) Proses Perencanaan Pembangunan

Proses penyusunan perencanaan program tahun 2018 dilakukan dengan : (1) konsultasi publik melalui *Focused Group Discussion* (FGD) yang melibatkan *stakeholder* diantaranya pakar dari Perguruan Tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), asosiasi profesi dan dunia usaha; (2) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum SKPD; (3) forum Musrenbang RKPD 2017; (4) dialog interaktif dengan DPRD Jawa Tengah, guna memperoleh masukan-masukan untuk penyempurnaan.

### 4) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Di dalam melaksanakan urusan kehutanan, kondisi sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam relatif memadai. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan aset daerah yaitu berupa tanah dan peralatan (alat kantor dan rumah tangga), gedung dan bangunan, buku perpustakaan.

### 5) Alokasi dan Realisasi Anggaran.

Urusan Kehutanan meliputi 5 Program dengan anggaran sejumlah Rp51.964.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 89,96% dan keuangan 81,39%., meliputi 5 program dengan rincian sebagai berikut:

- a) **Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan**, dengan Rp15.110.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 97,85% dan keuangan sebesar 91,84%.
- b) **Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.300.000.000,00 realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,37%.
- c) **Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan**, alokasi anggaran sebesar Rp2.304.475.000,00 realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,14%.
- d) **Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.050.000.000,00 realisasi fisik 99,50% dan keuangan sebesar 91,04%.

- 
- e) Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp22.199.525.000,00 realisasi fisik sebesar 78,20% dan realisasi keuangan 66,73%.

**6) Permasalahan dan Solusi.**

**a) Permasalahan.**

- (1) Masih rendahnya produktifitas hutan dari aspek bukan kayu.
- (2) Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sebagai salah satu ikon pembangunan kehutanan dalam pengelolaan hutan di Jawa Tengah.

**b) Solusi**

- (1) Pengembangan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan dengan membuka akses pasar, modal dan pendampingan dalam pengembangannya, serta pola kemitraan atau kerjasama dengan swasta.
- (2) Peningkatan peran serta masyarakat melalui kemudahan akses pengelolaan hutan.

**e. Energi dan Sumber Daya Mineral**

**1) Program dan Kegiatan**

**a) Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah**

Program tersebut dilaksanakan melalui 21 kegiatan, antara lain: Kegiatan Pembuatan Profil Investasi di Jateng serta Peningkatan Kerjasama dan Promosi Pertambangan dengan hasil tersolialisasikannya data dan informasi pertambangan kepada masyarakat melalui pameran profil, promosi serta film dokumenter; Kegiatan Pembangunan Sumur Bor di daerah Rawan Kering dengan hasil tercukupinya kebutuhan air baku bagi masyarakat di daerah rawan kering melalui 8 unit sumur bor, serta tersedianya data geologi bawah permukaan untuk identifikasi potensi air tanah; Kegiatan Pembinaan Usaha Pertambangan di Jawa Tengah dengan hasil

---

meningkatnya pemahaman pelaku usaha pertambangan; Kegiatan Penyusunan Zona Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) di Jawa Tengah dengan hasil terlaksananya pemanfaatan air tanah pada CAT secara aman dan berkesinambungan; dan Kegiatan Penyusunan Potensi serta Neraca Sumberdaya dan Cadangan Mineral di Jawa Tengah dengan hasil tersedianya data Potensi serta Neraca Sumberdaya dan Cadangan Mineral di Jawa Tengah.

**b) Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas**

Program tersebut dilaksanakan melalui 22 kegiatan, antara lain: Kegiatan Pengembangan listrik Murah dan Hemat di Wilayah BESDM Slamet Selatan dengan hasil tercukupinya kebutuhan listrik bagi keluarga kurang mampu sebanyak 681 KK; Wilayah BESDM Kendeng Selatan sebanyak 612 KK, Wilayah BESDM Sewu Lawu sebanyak 580 KK, Wilayah BESDM Ungaran Telomoyo sebanyak 502 KK, dan Wilayah BESDM Solo sebanyak 432 KK.

**c) Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi**

Program tersebut dilaksanakan melalui 7 kegiatan, antara lain: Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Jawa Tengah dengan hasil Terbangunnya 2 unit PLTMH pada daerah yang belum ada jaringan listrik PLN; Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Energi di Jawa Tengah dengan hasil Terbangunnya 10 unit demplot biogas untuk substitusi bahan bakar bagi masyarakat, Tumbuhnya semangat konservasi energi di Jateng, dan Terupdatenya Dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Jawa Tengah; Kegiatan Pembangunan PLTS SHS di Jawa Tengah dengan hasil tercukupinya kebutuhan listrik bagi masyarakat belum berlistrik melalui 87 unit Pembangunan PLTS SHS bagi masyarakat belum berlistrik, Terpasangnya 1 unit PLTS Roof top pada gedung

---

pemerintah Provinsi Jawa Tengah guna konservasi energi, dan Berfungsinya PLTS PJU sebanyak 120 unit; Kegiatan Audit Energi Gedung Perkantoran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan hasil Tersedianya informasi penggunaan energi pada Gedung Perkantoran Pemerintah di Jawa Tengah dan potensi peghematan konsumsi energinya, serta Munculnya kesadaran budaya hemat energi bagi aparatur pemerintah dan masyarakat Jawa Tengah; dan Kegiatan Kajian Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) di Jawa Tengah dengan hasil Tersedianya informasi potensi EBT yang dimiliki Kab/Kota.

## **2) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara**

Dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Biro ISDA Setda Provinsi Jawa Tengah.

## **3) Proses Perencanaan Pembangunan**

Proses penyusunan perencanaan program tahun 2018 dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan teknokratik melalui berbagai tahapan sebagai berikut : (1) evaluasi capaian kinerja RKPD 2016 dan RKPD 2017 sampai dengan TW I; (2) konsultasi publik melalui *Focused Group Discussion* (FGD) yang melibatkan representasi *stakeholder* pembangunan daerah diantaranya tokoh masyarakat, pakar dari Perguruan Tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) (3) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum SKPD.

## **4) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan**

Di dalam melaksanakan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, kondisi sarana dan prasarana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Biro ISDA Setda Provinsi Jawa Tengah relatif memadai. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan aset daerah yaitu berupa tanah, peralatan dan mesin (alat berat, alat bengkel, alat kantor dan rumah tangga, alat laboratorium), gedung dan bangunan.

---

## 5) Alokasi dan Realisasi Anggaran.

Anggaran Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral sejumlah Rp36.569.572.000,00, dilaksanakan oleh Dinas ESDM dan Biro ISDA dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 87,18%. melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

- a) **Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp14.243.195.000,00 realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 88,20%.
- b) **Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas**, dengan alokasi anggaran sejumlah Rp14.824.637.000,00 realiasi fisik sebesar 100% dan keuangan 82,96%.
- c) **Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi**, dengan alokasi anggaran sejumlah Rp7.501.740.000,00 realiasi fisik sebesar 100% dan keuangan 93,57%.

## 6) Permasalahan dan Solusi

### a) Permasalahan

- (1) Masih terdapatnya sekitar 138.126 KK belum berlistrik.
- (2) Banyak perorangan/badan hukum pemilik genset belum berijin dan belum memenuhi standar Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), yaitu Sertifikat Laik Operasi (SLO) dan Operator bersertifikat.
- (3) Masih adanya kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan kurang-taatan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) terkait kewajibannya sebagai pemegang IUP (menyusun laporan bulanan/triwulan, membuat RKAB tahunan, pasang patok, reklamasi, dll).
- (4) Pengembangan potensi energi baru terbarukan belum optimal.

**b) Solusi**

- (1) Menambah pemasangan sambungan listrik murah bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS) baik melalui pendanaan pemerintah (APBN dan APBD) maupun pihak swasta (melalui dana CSR) dan membangun jaringan listrik pedesaan melalui jaringan listrik PLN maupun dengan pengembangan energi baru terbarukan bagi daerah yang memiliki potensi EBT namun jauh dari jangkauan jaringan listrik PLN.
- (2) Meningkatkan sosialisasi dan pendekatan persuasif kepada masyarakat terkait kepatuhan terhadap perijinan dan pentingnya standar Keselamatan Ketenagalistrikan.
- (3) Melakukan pendekatan persuasif bagi pelaku PETI yang diarahkan untuk mengurus perijinan (jika tata ruang setempat diperuntukkan untuk pertambangan) dan meningkatkan peran tim terpadu pengawasan pertambangan dengan melakukan patroli gabungan secara kontinyu untuk melakukan penindakan sesuai peraturan perundang-undangan; serta Melakukan pembinaan bagi pemegang IUP dan pengawasan usaha pertambangan.
- (4) Mendorong pengembangan dan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan, dimulai dari pemanfaatannya di kantor instansi pemerintah seperti pemasangan PLTS Roof top serta sumber EBT lainnya, seperti bio mass, PLTMH, gas rawa, dan lainnya.

---

**f. Perdagangan****1) Program dan kegiatan****a) Peningkatan Ekspor, Promosi dan Efisiensi Impor**

Program tersebut dilaksanakan melalui 8 kegiatan, antara lain: Kegiatan Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non migas dengan hasil meningkatnya pemahaman pelaku ekspor terhadap kebijakan ekspor, meningkatnya jumlah pelaku ekspor di Jawa Tengah yang terverifikasi sebanyak 100 orang, dan meningkatnya kualitas 90 orang pelaku ekspor melalui bintek manajemen ekspor sebanyak 3 kali; Kegiatan Peningkatan efisiensi impor non migas dengan hasil meningkatnya pemahaman 100 orang importir Jawa Tengah terhadap kebijakan impor melalui bintek kebijakan impor sebanyak 2 kali, semakin mudahnya pemanfaatan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) bagi 150 orang IKM berorientasi ekspor melalui Workshop Pemanfaatan KITE sebanyak 2 kali, dan meningkatnya pengawasan barang impor di Jawa Tengah melalui pelaksanaan post audit importir Jawa Tengah bagi 150 orang; Kegiatan Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di luar negeri dengan hasil antara lain meningkatnya kemampuan eksportir dalam mengakes pasar ekspor Jawa Tengah melalui penilaian eksportir tangguh dari 50 pelaku usaha, tersebar luasnya informasi produk unggulan Jawa Tengah melalui fasilitasi misi dagang ke kawasan asia sebanyak 2 kali, dan meningkatnya daya saing 100 pelaku usaha di tingkat internasional melalui fasilitasi Forum Penguatan Perdagangan Internasional di kawasan Asean; Kegiatan Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah dengan hasil meningkatnya pelayanan laboratorium penguji dan laboratorium kalibrasi melalui penerbitan sertifikat hasil uji dan sertifikat kalibrasi masing-masing sebanyak 600 sertifikat, dan meningkatnya pelayanan lembaga

---

sertifikasi produk melalui penerbitan sertifikat produk sebanyak 5 sertifikat; Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pengujian Produk dan Hasil Tembakau dengan hasil meningkatnya pelayanan uji mutu produk melalui pengadaan peralatan uji mutu produk dan hasil tembakau sebanyak 3 paket, dan meningkatnya Pelayanan Laboratorium Kalibrasi di Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang.

**b) Program Peningkatan Logistik Daerah, Akses Pasar Dalam Negeri dan Pemberdayaan UDKM**

Program tersebut dilaksanakan melalui 7 kegiatan, antara lain: Kegiatan Pemantauan stok, distribusi dan harga Kepokmas maupun komoditi strategis lainnya dengan hasil meningkatnya kualitas informasi harga bahan Kepokmas dan barang penting di Jawa Tengah sebanyak 18 jenis komoditi; Kegiatan Pengembangan jaringan distribusi daerah dengan hasil meningkatnya pengawasan ketersediaan barang melalui pemantauan terhadap 4 jenis barang (gula, pupuk bersubsidi, bahan berbahaya, dan LPG) di 5 kabupaten (Semarang, Temanggung, Magelang, Rembang, dan Sragen), serta meningkatnya kualitas informasi gudang melalui pemetaan kondisi dan penerbitan sertifikat 15 gudang, dan pembuatan 50 buku profil gudang; Kegiatan Pembinaan dan peningkatan sarana prasarana usaha dagang dan pasar tradisional dengan hasil meningkatnya kondisi pasar rakyat di Jawa Tengah sehingga layak untuk diajukan proses sertifikasi SNI Pasar Rakyat; Kegiatan Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang dengan hasil meningkatnya kemitraan antara 180 orang pelaku usaha dagang dengan toko modern, dan meningkatnya kualitas sistem perdagangan melalui pelaksanaan Temu Dagang Komoditas Agro Jawa Tengah di STA Soropadan Kabupaten Temanggung yang diikuti oleh 200 orang; dan Kegiatan Peningkatan sistem informasi pelayanan perijinan dan usaha dagang dengan hasil

---

tersebar luasnya informasi proses perijinan SIUP dan TDP di Jawa Tengah.

**c) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri**

Program tersebut dilaksanakan melalui 7 kegiatan, antara lain Kegiatan Pengawasan barang beredar dan jasa dengan hasil meningkatnya keamanan penggunaan barang, meningkatnya kualitas persaingan usaha, dan meningkatnya perlindungan terhadap konsumen melalui koordinasi antara LPKSM, BPSK, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; Kegiatan Sosialisasi ketentuan di bidang cukai dengan hasil meningkatnya pengetahuan 600 orang konsumen tentang cukai melalui sosialisasi ketentuan bidang cukai dan perlindungan konsumen, dan meningkatnya pemahaman pelaku usaha industri hasil tembakau dan barang kena cukai melalui edukasi kepada 460 pelaku usaha; Kegiatan Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran dengan hasil meningkatnya informasi legalitas produk hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu sebanyak 300 unit usaha di Jawa Tengah, meningkatnya jumlah pelaku usaha profesional yang menghasilkan produk berkualitas sebanyak 100 orang, dan meningkatnya sinergitas pengawasan tertib niaga antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 35 Pemerintah Kabupaten/Kota; Kegiatan Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran dengan hasil meningkatnya informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran melalui indentifikasi 2.000 barang kena cukai, dan meningkatnya kepastian usaha budidaya tembakau dan industri lainnya bagi 6 IKM tembakau dan IKM industri lainnya di 6 Kabupaten (Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kudus, Demak, dan Banjarnegara) melalui bimbingan implementasi SNI tembakau

rajanan dan industri lainnya; Kegiatan Peningkatan perlindungan dan pemberdayaan konsumen dengan hasil meningkatnya kapasitas kelembagaan 9 BPSK, meningkatnya pengetahuan pelajar tentang perlindungan konsumen bagi 200 pelajar melalui edukasi perlindungan konsumen, dan meningkatnya pengetahuan masyarakat Jawa Tengah tentang perlindungan konsumen melalui kompetisi dalam rangka Hari Konsumen Nasional.

## **2) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara**

Dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.

## **3) Proses Perencanaan Pembangunan**

Proses penyusunan perencanaan program tahun 2018 dilakukan dengan pendekatan partisipatif, *bottom up* dan *top down* melalui berbagai tahapan sebagai berikut : (1) konsultasi publik melalui *Focused Group Discussion* (FGD) dan *expert meeting* yang melibatkan representasi *stakeholder* pembangunan daerah diantaranya tokoh masyarakat, pakar dari Perguruan Tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), asosiasi profesi dan dunia usaha (2) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum SKPD; (3) forum Musrenbang RKPD 2017.

## **4) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan**

Di dalam melaksanakan urusan industri, kondisi sarana dan prasarana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah relatif memadai. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan aset daerah yaitu berupa tanah dan peralatan (alat kantor dan rumah tangga), gedung dan bangunan, buku perpustakaan serta barang bercorak kesenian dan kebudayaan.

## **5) Alokasi dan Realisasi Anggaran.**

Dengan anggaran sejumlah Rp15.435.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 90,42% melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

- 
- a) **Program Peningkatan Ekspor, Promosi dan Efisiensi Impor**, alokasi anggaran sejumlah Rp7.500.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 87,59%.
  - b) **Program Peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri dan Pembedayaan UDKM**, alokasi anggaran sejumlah Rp4.335.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 89,68%.
  - c) **Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri**, alokasi anggaran sejumlah Rp3.600.000.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,19%.

## 6) Permasalahan dan Solusi

### a) Permasalahan

- (1) Masih tingginya defisit neraca perdagangan Jawa Tengah.
- (2) Masih terjadi gejolak harga, kelangkaan dan disparitas harga bahan pokok.
- (3) Belum terintegrasinya sistem perdagangan (pengumpul, eceran dan grosir).
- (4) Perlindungan terhadap konsumen belum optimal.
- (5) Belum optimalnya pemasaran produk UDKM melalui media digital.

### b) Solusi

- (1) Misi dagang dan perluasan pasar ekspor non tradisional.
- (2) Optimalisasi kerjasama kemitraan antara industri orientasi ekspor dengan perusahaan industri besar dengan kecil/menengah.
- (3) Menyusun peta distribusi, menjamin ketersediaan dan distribusi barang kebutuhan pokok penting dan strategis.
- (4) Mensinergikan pelaksanaan pengawasan barang dan jasa yang beredar dengan kelompok swadaya masyarakat seperti LP2K, LPKSM.

- 
- (5) Membangun jaringan pemasaran melalui kerjasama dan pengembangan aplikasi penjualan online padhegayeng.jatengprov.go.id bagi UDKM.

## **g. Industri**

### **1) Program dan Kegiatan**

#### **a) Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil (ILMT)**

Program tersebut dilaksanakan melalui 10 kegiatan, antara lain: Kegiatan Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri logam, mesin dan tekstil dengan hasil meningkatnya akses pasar industri kreatif logam, mesin dan tekstil 2 industri di Jabodetabek; Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan data dan informasi industri logam, mesin dan tekstil dengan hasil meningkatnya ketersediaan informasi kebutuhan bahan baku industri non agro di 35 Wilayah; Kegiatan Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan pelayanan UPT logam dengan hasil meningkatnya keterampilan SDM industri dalam penerapan ISO 9001:2008 sebanyak 15 orang di Instalasi Pengembangan Teknologi Logam Semarang dan meningkatnya kualitas penerapan ISO 9001:2008 1 instalasi di Instalasi Pengembangan Teknologi Logam Semarang melalui surveillance tahap III; Kegiatan Klaster dan Sentra Industri Logam Mesin dan Tekstil dengan hasil meningkatnya pemahaman IKM dalam penerapan GKM pada industri ILMT sebanyak 30 orang dari 10 industri bimbingan di Kota Semarang, Klaten, serta Tegal; Kegiatan Pengembangan SDM Industri Bidang Tekstil dan Alas Kaki dengan hasil antara lain meningkatnya kompetensi SDM melalui penyediaan mesin dan peralatan produksi alas kaki di BPPTAK Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1 line produksi, meningkatnya pengetahuan dan peran aktif masyarakat dalam

---

pengembangan industri alas kaki di 10 Kabupaten/ Kota, dan meningkatnya keterampilan sumber daya manusia IKM pakaian jadi sebanyak 40 orang melalui pelaksanaan pelatihan.

**b) Program Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan (IAKHH)**

Program tersebut dilaksanakan melalui 4 kegiatan, yaitu: Kegiatan Pengembangan klaster dan sentra industri Agro dengan hasil berkembangnya sentra industri agro dan meningkatnya jejaring kerjasama melalui 1 kesepakatan, bertambahnya jumlah komunitas komunitas klaster olahan ikan sebanyak 1 klaster, dan meningkatnya jalinan kemitraan petani tebu dengan pabrik gula di Jawa Tengah; Kegiatan Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri agro, kimia dan hasil hutan dengan hasil meningkatnya promosi produk dari 10 industri meubel melalui pameran IFEX di Jakarta, meningkatnya promosi produk dari 10 industri pangan melalui pameran HPS di Jawa Tengah, serta tersebarluasnya informasi dan meningkatnya daya saing produk industri furniture dari 50 industri meubel melalui Gelar Promo Produk Jawa Tengah di Semarang; Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan data dan informasi industri industri agro, kimia dan hasil hutan dengan hasil meningkatnya ketersediaan data kebutuhan gula industri di Jawa Tengah dan meningkatnya ketersediaan data pemetaan potensi pengguna produk industri tepung berbasis ubi kayu di Jawa Tengah; Kegiatan Pembinaan Lingkungan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi (Bidang Industri Agro) dengan hasil antara lain meningkatnya pemahaman SDM dari 30 industri agro tentang radiasi pengawetan produk, bertambahnya jumlah sertifikat halal produk pangan lokal IKM sebanyak 50 sertifikat, meningkatnya pemahaman SDM Industri Agro tentang ISO 9002/2015 pada 20 industri agro di Kota Semarang.

---

**c) Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka (IATEA)**

Program tersebut dilaksanakan melalui 6 kegiatan, antara lain: Kegiatan Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka dengan hasil meningkatnya daya saing produk dari 50 industri kreatif digital di Jawa Tengah melalui event Gelar Industri Kreatif Digital Jawa Tengah; Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan data dan informasi industri industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka dengan hasil meningkatnya ketersediaan data peta kawasan industri di Jawa Tengah; Kegiatan Pengembangan Klaster dan Sentra Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan Aneka dengan hasil meningkatnya kemampuan SDM Desa Berdikari berbasis kerajinan bambu di Kabupaten Karanganyar sebanyak 30 orang; bertambahnya jumlah wirausaha baru industri sandal bandol, sapu, grabah, akar kayu, hasil laut non konsumsi, cangking, serabut kelapa, bambu, payung hias sebanyak 25 orang tersebar di Kabupaten Banyumas Purbalingga, Banjarnegara, Rembang, Pemalang, Pekalongan, Demak, Kebumen, Wonosobo, dan Klaten; dan meningkatnya publikasi produk dari 50 IKM di Jawa Tengah melalui penyediaan web; Kegiatan Pengembangan Produk Industri Kreatif dengan hasil meningkatnya ketrampilan SDM industri kreatif berbasis E-commerce sebanyak 25 orang, meningkatnya kemampuan SDM industri kreatif digital melalui event di BITC Cimahi Bandung, dan tersebarluasnya informasi produk bidang industri kreatif digital dari Balai Pengembangan Kemasan dan Industri Kreatif.

---

**d) Program Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Industri dan Dagang**

Program tersebut dilaksanakan melalui 5 kegiatan, antara lain: Kegiatan Peningkatan Sinergitas Program Pengembangan Industri dan Perdagangan dengan hasil antara lain partisipasi aktif dalam pelaksanaan hasil kegiatan MPU, terselenggaranya pelayanan pengajuan rekomendasi penyusunan Raperda RPIK dari 15 Kabupaten/kota, dan meningkatnya kualitas pemantauan pelaksanaan koordinasi wilayah industri di 15 Kabupaten/Kota; Kegiatan Pengembangan wirausaha baru IKM potensial dengan hasil meningkatnya ketrampilan teknis masyarakat di wilayah kemiskinan/berdikari sebanyak 300 orang tersebar di 6 kabupaten; meningkatnya kemampuan 2 KUB di wilayah kemiskinan/berdikari Kabupaten Purbalingga dan Demak melalui pemberian 2 paket bantuan peralatan, meningkatnya keterampilan teknis SDM difabel sebanyak 10 orang melalui pelatihan teknis sebanyak 1 kali; Kegiatan Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah dengan hasil meningkatnya ketrampilan teknis pengelolaan bahan baku lokal pada klaster industri di daerah miskin sebanyak 120 orang tersebar di 5 Kabupaten/Kota guna menumbuhkan wirausaha baru, meningkatnya kemampuan KUB melalui pemberian bantuan peralatan meubel sebanyak 1 paket kepada KUB Jaya Abadi Dukuh Kaliwuluh Desa Sambu Rembe Kecamatan Kaliambe Kabupaten Sragen; Kegiatan Peningkatan Dukungan DEKRANASDA Jawa Tengah dengan hasil meningkatnya daya saing produk kriya Jawa Tengah dari 54 peserta melalui event Pesona Produk Kriya Jawa Tengah di Pemalang dan meningkatnya kompetensi kelembagaan Dekranasda Jawa Tengah sebanyak 40 Orang; Kegiatan Pengembangan Website dan Informasi Publik dengan hasil meningkatnya kualitas website Dinas Perindag Provinsi Jawa

Tengah menjadi lebih informatif, meluasnya cakupan layanan informasi melalui pengembangan Sistem Informasi PPID Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah menggunakan aplikasi play store, dan meningkatnya kompetensi SDM pendukung PPID sebanyak 30 orang.

## **2) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara**

Dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.

## **3) Proses Perencanaan Pembangunan**

Proses penyusunan perencanaan program tahun 2018 dilakukan dengan pendekatan partisipatif, *bottom up* dan *top down* melalui berbagai tahapan sebagai berikut : (1) konsultasi publik melalui *Focused Group Discussion* (FGD) dan *expert meeting* yang melibatkan representasi *stakeholder* pembangunan daerah diantaranya tokoh masyarakat, pakar dari Perguruan Tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), asosiasi profesi dan dunia usaha (2) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum SKPD; (3) forum Musrenbang RKPDP 2018.

## **4) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan**

Di dalam melaksanakan urusan industri, kondisi sarana dan prasarana Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah relatif memadai. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan aset daerah yaitu berupa tanah dan peralatan (alat kantor dan rumah tangga), gedung dan bangunan, buku perpustakaan serta barang bercorak kesenian dan kebudayaan.

## **5) Alokasi dan Realisasi Anggaran.**

Dengan anggaran sejumlah Rp19.184.000.000,00, dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 90,74% dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 
- a) **Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil**, alokasi anggaran sejumlah Rp7.394.500.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan 92,29%.
  - b) **Program Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan**, alokasi anggaran sejumlah Rp6.000.000.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan 91,75%.
  - c) **Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan Aneka**, alokasi anggaran sejumlah sebesar Rp3.269.500.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan 90,63%.
  - d) **Program Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Industri dan Dagang**, alokasi anggaran sejumlah Rp2.520.000.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan 83,91%.

## 6) Permasalahan dan Solusi

### a) Permasalahan

- (1) Kurangnya ketersediaan suplai bahan baku industri;
- (2) Rendahnya pemanfaatan teknologi, kualitas SDM, pemasaran dan manajemen khususnya bagi industri kecil;
- (3) Ketatnya persaingan antar industri besar khususnya otomotif dan komponen;
- (4) Terbatasnya dukungan sarana dan prasarana layanan teknis kepada pelaku usaha.

### b) Solusi

- (1) Menjamin ketersediaan, kemudahan bahan baku dan kemitraan serta integrasi antara hulu dan hilir yang didukung infrastruktur yang memadai;
- (2) Penyiapan tenaga kerja siap pakai dan program alih teknologi;
- (3) Peningkatan penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HKI),

---

standardisasi, system quality control, keamanan produk dan perluasan pangsa pasar khususnya industri alat transportasi dan komponen otomotif;

(4) Peningkatan sarana prasarana layanan teknis.

## **h. Transmigrasi**

### **1) Program dan Kegiatan**

#### **a) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi**

Program tersebut dilaksanakan melalui 3 kegiatan, yaitu: Pelatihan Transmigrasi, dengan hasil meningkatnya ketrampilan calon transmigran di bidang pertanian sebanyak 50 KK; Penyiapan Penempatan dan Pemantapan Transmigrasi, dengan hasil adanya kesepakatan Kerjasama Antar Daerah (KSAD) dengan 8 Provinsi daerah penempatan dan penempatan 100 KK transmigran ke lokasi penempatan transmigrasi dan resettlemen; Pemantauan Transmigran Pasca Penempatan dengan hasil tersedianya data yang akuntabel tentang informasi penempatan transmigran di 5 provinsi daerah penempatan.

#### **2) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara**

Urusan Ketransmigrasian dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah.

#### **3) Proses Perencanaan Pembangunan**

Proses penyusunan perencanaan program tahun 2018 dilakukan dengan pendekatan partisipatif, *bottom up* dan *top down* yang implementasinya melalui berbagai tahapan sebagai berikut : (1) konsultasi publik melalui *Focused Group Discussion* (FGD) yang melibatkan *stakeholder* diantaranya tokoh masyarakat, pakar dari Perguruan Tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) (2) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum SKPD; (3) forum Musrenbang RKPD 2018.

---

#### **4) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan**

Di dalam melaksanakan urusan transmigrasi, kondisi sarana dan prasarana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah relatif memadai. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan aset daerah yaitu berupa tanah dan peralatan (alat kantor dan rumah tangga, alat kesehatan), gedung dan bangunan.

#### **5) Alokasi dan Realisasi Anggaran.**

Alokasi anggaran sejumlah Rp1.726.392.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 85,49% melalui Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.

#### **6) Permasalahan dan Solusi**

##### **a) Permasalahan**

- (1) Tidak sebandingnya antara jumlah peminat calon transmigran dan terbatasnya kuota peserta transmigrasi yang ditentukan oleh pemerintah Pusat.

##### **b) Solusi**

- (1) Mengembangkan program transmigrasi yang bersifat sharing, yaitu kerja sama dengan pemerintah daerah lain, Meningkatkan pola Kerjasama Antar Daerah yang lebih intensif dengan daerah penempatan, Berkoordinasi untuk mendorong Pusat meningkatkan kuota transmigran dari Provinsi Jawa Tengah.